EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

RIVA ANISA
07011381621131

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

RIVA ANISA
07011381621131

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2021

Pembimbing I

Dr. M Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II

Dr. Nengyanti, M.Hum.
NIP. 196704121992032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul "*Evaluasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2021.

Palembang, 11 Januari 2021

Ketua :

1. Dr. M. Husni Thamrin, M.Si .....
   NIP. 196406061992031001

Anggota :

2. Dr. Nengyanti, M.Hum .....
   NIP. 196704121992032002

3. Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM .....
   NIP. 195811191985031003

4. Drs. Gatot Budiarto, MS .....
   NIP. 195806091984031002

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan.

(Bertrand Russell)

Dengan rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku, Halimudin dan Lessi Bunarsi.
2. Kedua Papa dan Mamaku, Agus Rahman dan Siti Harlina
3. Adikku, Aqila Aulia Ramadhani.
4. Sahabat dan teman-temanku.
5. Almamaterku.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi CIPP, yang terdiri dari empat dimensi yaitu *context, input, process,* dan *product*. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis belum dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Dinas Sosial Kota Palembang belum menjalankan tahap rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Upaya pembinaan yang dilakukan hanya sebatas perlindungan sosial yang meliputi penjangkauan sampai dengan penyerahan hasil penjangkauan kepada Panti Sosial UPTD Provinsi. Hal ini dikarenakan dimensi *input* yang tidak tersedia meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana di Dinas Sosial Kota Palembang, sehingga berimbas pada dimensi *process* dan *product*. Penelitian ini menyarankan kepada Dinas Sosial Kota Palembang untuk dapat membuat suatu kolaborasi dengan pihak terkait antara lain Dinas Sosial Provinsi, LSM, dan RSJ untuk membuat rencana kerja dan evaluasi setiap tahunnya mengenai kegiatan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Kata Kunci: Evaluasi, Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Pembimbing I

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II

Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Palembang, Januari 2021
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This study discusses the Evaluation of Street Children, Homeless, and Beggars Development Policy by the Social Service of Palembang City. This study aims to see the policy evaluation of street children, homeless people, and beggars by the Social Service of Palembang City. The theory used is the CIPP evaluation theory, which consists of four dimensions, namely context, input, process, and product. The research method uses a qualitative descriptive approach. The data technique uses literary techniques and interviews, observation, and documentation. Based on the research, it shows that the Regional Regulation of Palembang City Number 12 of 2013 concerning Development of Street Children, Homeless, and Beggars has not been carried out by the Palembang City Social Service. The Social Service of Palembang City has not carried out the social rehabilitation and social empowerment stages. Efforts to provide guidance are limited to social protection, which includes outreach to delivery of outreach results to the Provincial UPTD Social Institution. This is because the input dimensions that are not available include human resources and infrastructure at the Palembang City Social Service, so that it impacts on the process and product dimensions. This research is suggested to the Palembang City Social Service to collaborate with related parties, including the Provincial Social Service, NGO, and Psychiatric Hospital to make a work plan and evaluation of every activity of street children, homeless people, and beggars.

Keywords: Evaluation, Policy Evaluation, Development Policy for Street Children, Homeless, and Beggars

Advisor I

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.
NIP.196406061992031001

Advisor II

Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Palembang, January 2021
Department Chief of The Public Administration
Faculty of Social and Political Science
University of Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala kasih dan karuniaNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang" guna untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih MPA. selaku Wakil Dekan III
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. dan Ibu Ermanovida, S.Sos. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si. selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum. selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si. dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembahas Seminas Usulan Proposal yang telah memberikan masukan dan saran pada proposal usulan skripsi saya selama ujian berlangsung.
8. Bapak Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM. dan Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.Si. selaku dosen Penguji Ujian Komprehensif Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran pada skripsi saya.
9. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Pihak Dinas Sosial Kota Palembang dan seluruh informan yang telah banyak membantu saya dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa FISIP Palembang (HIMAFISIPAL).

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya.

Palembang, 19 Januari 2021

Riva Anisa

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR ISTILAH ..... **xii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TIINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 8
1. Kebijakan Publik 8
2. Evaluasi Kebijakan 9
3. Model Evaluasi Kebijakan 11
4. Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis 14
B. Teori yang Digunakan 17
C. Penelitian Terdahulu 18
D. Kerangka Pemikiran 20

BAB III METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian 23
B. Definisi Konsep 23
C. Fokus Penelitian 25
D. Jenis dan Sumber Data 26
1. Jenis Data 26
2. Sumber Data 27
E. *Key Informant* 27
F. Teknik Pengumpulan Data 28
1. Wawancara 28
2. Observasi 28
3. Dokumentasi 29
G. Validitas Data 29
H. Teknik Analisis Data 30
1. Reduksi Data 30
2. Penyajian Data 31
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 32
1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palembang 32
2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palembang 34
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang 43
4. Panti Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) 45
5. Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis 46
B. Hasil dan Pembahasan 47
1. Evaluasi *Context* 47
a. Latar Belakang Kebijakan 48
b. Tujuan Kebijakan 49
2. Evaluasi *Input* 51
a. Sumber Daya Manusia 51
b. Sarana Prasarana 56
3. Evaluasi *Process* 61
a. Tahap Pelaksanaan 61
b. Tahap Pengawasan 71
4. Evaluasi *Product* 73
a. Hasil Kebijakan 73
b. Dampak Kebijakan 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN 82

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palembang 4
2. Intisari Model CIPP 13
3. Penelitian Terdahulu 18
4. Fokus Penelitian 25
5. Data Jumlah Pegawai Bidang di Dinas Sosial Kota Palembang 53
6. Data Jumlah Hasil Penjangkauan yang diserahkan ke Panti Rehabilitasi PGOT Tahun 2020 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kondisi Panti Sosial UPTD Kota Palembang..... 5
2. Mekanisme Pelaksanaan Pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Palembang..... 16
3. Kerangka Pemikiran 22
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang 44
5. Surat Keputusan Pembentukan Tim Terpadu Penjangkauan..... 52
6. Mobil Patroli Milik Dinas Sosial Kota Palembang 56
7. Eks Panti Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN)..... 58
8. Kondisi Tempat Penampungan..... 59
9. Kondisi Ruang Isolasi..... 60
10. Proses Penjangkauan oleh Tim Terpadu Penjangkaun..... 63
11. Surat Pernyataan Permohonan Rehabilitasi..... 72
12. Grafik Jumlah Hasil Penjangkauan 75

DAFTAR ISTILAH

Anak Jalanan	:	Anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya beraktifitas di jalan dan tempat umum dan melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
Gelandangan	:	Orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang di tempat-tempat umum dan di jalanan.
Jaminan Sosial	:	Skema yang melembaga untuk memenuhi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Pemberdayaan Sosial	:	Semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pengemis	:	Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan.
Penjangkauan	:	Penjemputan atau penyelamatan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang terlantar yang beraktifitas di jalan dan di tempat-tempat umum tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban untuk dibina dan diberdayakan.
Perlindungan Sosial	:	Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
Rehabilitasi Sosial	:	Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan sesesorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PRAN	: Panti Rehabilitasi Anak Nusantara
PRPGOT	: Panti Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
Anjal	: Anak Jalanan
Gepeng	: Gelandangan dan Pengemis

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 83
2. Daftar Hadir Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang 92
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Penjangkauan 93
4. Tempat Penampungan Milik Dinas Sosial Kota Palembang 94
5. Dokumentasi Dinas Sosial Kota Palembang Saat Penjangkauan 96
6. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing 97
7. Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Sosial Kota Palembang 98
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I 99
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II 100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkembangan sosial berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama dalam keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Salah satu bentuk partisipasi pemerintah dalam mengelola kepentingan publik ialah dengan Administrasi Publik. Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010:7) Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalm kebijakan publik. Adapun salah satu peran administrasi publik ialah di bidang kesejahteraan sosial.

Timbulnya kesenjangan sosial dalam suatu masyarakat merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan dari pembangunan. Hal ini membuat kebutuhan ekonomi mengalami peningkatan mobilitas dan kompetisi masyarakat. Munculnya beragam pola penghidupan masyarakat merupakan pengaruh dari tingginya tingkat kompetisi masyarakat, salah satu fenomena sosial yang muncul ialah masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis atau yang sering disebut juga dengan anjal dan gepeng.

Umumnya anjal dan gepeng banyak dijumpai di negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini permasalahan anjal dan gepeng masih menjadi beban pembangunan nasional, oleh karenanya untuk menuntaskan permasalahan ini dibutuhkan peran dari pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara beriringan guna mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan kantong

kemiskinan yang hidup di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan perekonomian dan kebutuhan hidup.

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dengan kemiskinan di perkotaan. Semua anak memliki ksesempatan yang sama, Mereka juga pantas mendapatkan kesempatan pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Pemerintah sendiri menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Perlindungan Anak bahwa "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Meluasnya anjal dan gepeng mendapat pandangan khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa kota telah mengeluarkan Peraturan Daerah untuk menangani persoalan ini. Kota Palembang sendiri telah membuat kebijakan yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Pembinaan terhadap anjal dan gepeng bertujuan agar anjal dan gepeng bisa menjalankan fungsi sosialnya serta memenuhi keperluan utama untuk bisa hidup lebih baik. Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 4 disebutkan bahwa "dalam upaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, Pemerintah Kota berwenang untuk melakukan upaya-upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi : (a) perlindungan sosial, (b) rehabilitasi sosial, (c) pemberdayaan sosial, dan (d) jaminan sosial". Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar tidak semakin merambak, terutama yang

berada di jalanan dan tempat umum yang dapat menganggu ketertiban umum serta memberikan perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan dan resiko di jalanan.

Hasil penelitian Tribuwono (2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar belum mampu diterapkan secara efektif. Sumber daya dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang, padahal kebijakan ini diterapkan di seluruh Kota Makassar yang memiliki 13 kecamatan. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Padahal tujuan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah untuk (1) memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat, (2) menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati, (3) menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam muwujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat, (4) menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan (5) meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian.

Kemudian, penelitian Fesdyanda (2012) menytakan bahwa kinerja petugas rumah singgah mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi rumah singgah, dimana tingkat kemampuan ataupun kapabilitas para petugas dalam memahami prosedur pelayanan ataupun pemahaman mengenai profesi pekerjaan sosial belum optimal. Hal ini menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tahapan kegiatan pelayanan di rumah singgah. Namun untuk aspek lainnya sudah cukup baik, hanya perlu peningkatan dalam aspek sumber dana, sumber daya manusia, dansarana mobilitas di rumah singgah.

Hasil penelitian Widiyatmoko (2012) bahwa belum tercapainya target penanganan anak jalanan di Dinsos Kota Cilegon dikarenakan oleh kurangnya kesadaran dari anak jalanan itu sendiri dan kurang tegasnya pihak pemerintah. Pelatihan yang dilakukan tidak efisien karena waktu yang diberikan kurang lebih satu minggu tiap tahunnya. Pelatihan yang diberikan pun belum merata karena dibatasi dengan adanya kuota yang terbatas. Selain jumlahnya yang dibatasi, usia dari anak jalanan tidak diperhatikan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, oleh karena itu perlu dikupas lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang.

Perkembangan Kota Palembang yang pesat menjadi pemicu dari meningkatnya pusat-pusat keramaian. Bersamaan dengan itu jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang muncul di area sekitar pusat keramaian, seperti Mall, lampu lalu lintas, Terminal dan sebagainya semakin bertambah. Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memerlukan penanganan yang terstruktur serta memerlukan kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah. Selain menimbulkan ketidaktentraman di jalanan dan tempat umum, keberadaan anjal dan gepeng juga membahayakan bagi diri sendiri serta memungkinkan mereka menjadi target eksploitasi dan tindak kriminal.

Tabel 1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palembang

Tahun	Jenis				Total
	Anak Jalanan	Gelandangan	Pengemis	ODGJ	
2017	155	172	61	81	469
2018	145	213	75	212	645
2019	129	158	64	181	532

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang (2020)

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa angka PPKS hasil penjangkauan yang dilakukan di Kota Palembang selama tiga tahun mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah PPKS pada tahun 2017. Padahal seharusnya dengan diberlakukannya kebijakaan pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut dapat menurunkan jumlah populasi PPKS. Penyebab dari meningkatnya jumlah PPKS dapat dipengaruhi oleh masih adanya kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang tidak diterapkan. Dimana kegiatan yang ada di Panti Sosial UPTD yaitu Panti Rehabilitasi Anak Nusantara tidak melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Gambar 1. Kondisi Panti Sosial UPTD Kota Palembang
Sumber : diambil oleh penulis (23 Maret 2020).

Gambar 1. menunjukan kondisi bangunan UPTD Panti Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) Kota Palembang. Gambar tersebut menunjukan tidak adanya fasilitas yang memandai untuk dihuni oleh anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal tersebut juga mendasari banyak kejadian kaburnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, terlebih lagi tidak adanya kegiatan peningkatan kreatifitas bagi penghuni. Agar dapat diketahui bagaimana kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang, maka dari itu Penulis pun memilih judul : "Evaluasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan dari permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya dan menjadi referensi pembelajaran bagi para mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Kebijakan Publik.

2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan saran dan pemikiran bagi pihak-pihak atau instansi terkait dalam pemecahan masalah yang terkait dengan evaluasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Zainal. 2019. *Evaluasi Program: Teori dan Praktek dalam Konteks Pendidikan dan Non Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Cresswell, J.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. 2016. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Moleong, L.J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, R. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

_____. 2017. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakn Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Nurcholis, H. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2018 . *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tayibnaqis, F.Y. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Press.

_____. 2012. *Kebijakan Publik, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis.

Keputusan Walikota Palembang Nomor 572/KPTS/DINSOS/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penjangkauan, Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila dan Pengamen

Tulisan Ilmiah

Fesdyanda, D.A. 2012. *Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang.* Skripsi. Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro.

Tribuwono, J. 2017. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Geladangan Dan Pengemis di Kota Makasar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)*. Skripsi. Makasar: Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Widiyatmoko, Y.M. 2012. *Evaluasi Penanganan Anak Jalanan di Kota Cilegon*. Skripsi. Banten: Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.